

DAFTAR PUSTAKA

- Adharinalti. (2012). Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 1(3).
- Dunn, William N. (1998). *Terjemahaan Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gede Wiryawan, dkk. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*. 4(2). 169-176.
- Eko, Sutoro, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Ernawati, Dyah. (2019). Analisis Sinergi Desa Pakraman dan Desa Dinas Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Bali. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akutansi)*. 3(1).
- Hadi, Abd. (2017). Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. 13(26).
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- I Made Darpana. (2022). Majelis Desa Adat sebagai Pasikian Desa Adat di Bali. *Jurnal Kertha Negara*. 10(3).
- Koentjaraningrat. (1984). *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kushandajani. (2008). *Otonomi Desa: Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Kushandayani (dkk). (2011). Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. 2(2).

- Luthfia, Agusniar. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Development*. 4(2).
- Made Darpana & Gede Pasek (2022). Majelis Desa Adat Sebagai Pasikian Desa Adat di Bali. *Jurnal Kertha Negara*. 10(3). 290-298.
- Mandira, I Made Chandra. Cokorda Krisna Yudha. (2021). Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Publicuho*. 4(1).
- Muhammad A. Rauf. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal De Laga Lata*. 1(2).
- Nugroho, Saptono & Shafa Raya. (2019). Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Cerangsari. Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*. 7(2).
- Pariyanti, Eka, dkk. (2020). Objek Wisata dan Pelaku Usaha (Dampak Pengembangan Objek Wisata terhadap Ekonomi Masyarakat). Surabaya: Pustaka Aksara.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
- Purnama, Yoga dan Ari Atu Dewi. (2019). Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Jurnal Hukum Kenotariatan*. 4(2).
- Tim Penyusun PKMK-LAN. (2012). Pengembangan Pola Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan Lembaga Administrasi Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.